VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap temuan peneliti di lapangan tentang akuntabilitas Pembangunan Tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran, maka dapat disimpulkan bahwa :

1). Akuntabilitas Perencanaan Strategik dalam Pembangunan Tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka dimulai dengan perencanaan strategis kegiatan pembangunan dituangkan dalam dokumen perencanaan. Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran bertindak sebagai fasilitator dalam program pembangunan. Usulan tentang pembangunan berasal dari aspirasi masyarakat yang ditampung dalam suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan oleh masyarakat desa Kresnowidodo dan Negara Saka. Usulan Pembangunan Jembatan Way Sekampung sebagai penghubung ke dua desa agar membuka terisolasinya daerah akibat infrastruktur lama sudah rusak. Musrenbang yang diselenggarakan masyarakat desa Kresnowidodo dan Negara Saka dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten. Musrenbang

berorientasi untuk penjaringan aspirasi masyarakat, penentuan arah kebijakan SKPD, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD yang selanjutnya di usulkan ke DPRD untuk kegiatan pembangunan. Perencanaan secara teknis dalam kegiatan pembangunan diserahkan kepada pihak ke-III (pihak rekanan atau konsultan perencana).

Visi dan misi strategik Pembangunan Tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran tersebut yaitu membuka terisolasinya daerah akibat infrastruktur yang tidak mendukung. Upaya merealisasikan kegiatan pembangunan jembatan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan memberikan penguatan kepada DPRD tentang pentingnya pembangunan jembatan sebagai salah satu cara mencapai tujuan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2). Pelaksanaan akuntabilitas Pembangunan Tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran secara teknis melalui tahapan-tahapan untuk menentukan pengukuran kinerja pembangunan. Dalam penetapan capaian kerja maka tolok ukur capaian kerja kegiatan pembangunan sudah selesai 100% yakni sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada, dilakukan monitoring oleh Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari PPK, PTK, dan konsultan pengawas.

Evaluasi dan kesesuaian terkait dengan pekerjaan konstruksi didasarkan pada pengamatan kurva S yang di dalamnya memuat tahap-tahap pelaksanaan Pembangunan Tahap II Jembatan Way Sekampung

Kresnowidodo-Negara Saka. Hal itu juga menjadi dasar untuk memonitoring kinerja pihak ke-III (pihak rekanan).

3). Akuntabilitas Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran tidak terlepas dari bentuk pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas dan pihak ke-III (pihak rekanan) dengan melakukan audit dan pengawasan laporan harian, mingguan dan bulanan yang di sampaikan kepada PPK dan PTK atas hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan. PPK, PTK dan konsultan pengawas melakukan pengecekan ulang terhadap semua item kontrak kerja pembangunan sesuai batas waktu yang ditentukan yang selanjutanya dituangkan dalam berita acara pekerjaan bahwa sudah selesai 100%. Pertanggungjawaban keuangan dibahas oleh Komisi III DPRD Kabupaten Pesawaran yang mengevaluasi LPJ kegiatan program Pemerintah Kabupaten Pesawaran termasuk SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebagai penanggungjawab dalam kegiatan pembangunan.

Pertanggungjawaban SDM dilakukan dengan membentuk tim pengelola kegiatan yang terdiri dari PPK, PTK, KABID, KASI, pengawas dan konsultan pengawas. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan dalam Pembangunan Tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka disediakan sendiri oleh pihak ke-III (pihak rekanan).

Metode kinerja yang disepakati sudah termuat di dalam dokumen kontrak kerja. Mengenai pengendalian menejemen terkait dengan mutu pekerjaan

maka Dinas Pekerjaan Umum menempatkan konsultan pengawas sebagai konsultan pendamping dan memonitoring kegiatan pembangunan yang mencakup mutu, kualitas, dan menejemen pembangunan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang peneliti kemukakan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Pesawaran khususnya Dinas Pekerjaan Umum agar lebih menerapkan prinsip akuntabel dalam setiap kegiatan pembangunan sehingga hasil kinerja menjadi lebih optimal dan dalam penyusunan dokumen perencanan pembangunan lebih pro aktif melibatkan masyarakat karena perencanaan pembangunan muncul dari usulan masyarkat yang ditampung dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dinas Pekerjaan Umum dalam menyusun dokumen perencanaan harus lebih koordinatif dengan pihak ke-III (pihak rekanan atau konsultan perencana) mengingat setiap dana kegiatan dianggarkan dari APBD Kabupaten Pesawaran.
2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran diharapkan agar pelaksanaan akuntabilitas kegiatan lebih maksimal dalam menentukan pengukuran kinerja pembangunan yang dirumuskan oleh konsultan perencana karena pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan perencanaan program dan menjadi dasar penyusunan LAKIP. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran harus lebih maksimal dalam

memonitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tepat waktu, tepat biaya dan tepat sasaran.

3. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran dalam mewujudkan akuntabilitas pertanggungjawaban (evaluasi dan pelaporan) sebaiknya membentuk tim khusus pengawas independen yang dapat meminta laporan kinerja pihak ke-III (pihak rekanan) setiap saat yang berkoordinasi dengan konsultan pengawas dalam melakukan *cross check* terhadap semua item kontrak kerja pembangunan sehingga dalam pertanggungjawaban kinerja dan keuangan yang dibahas oleh DPRD benar-benar sesuai dan akuntabel tidak terdapat temuan baik dalam penggunaan dana maupun hasil kinerja. Hal ini juga akan lebih meminimalisir penggunaan anggaran dan lebih mewujudkan pembangunan yang akuntabel mencakup mutu, kualitas, dan menejemen pembangunan agar pekerjaan tepat waktu, tepat biaya dan tepat sasaran.